BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah faktor vital dalam administrasi sekolah yang berkontribusi pada kelancaran proses pendidikan. Untuk mencapai pengelolaan Dana BOS yang optimal, diperlukan yang tepat, dan pengalokasian yang komprehensif, pengawasan yang cermat, penilaian yang teratur, pelaporan yang tepat dan pengalokasian anggaran yang bijaksana. Dana BOS disalurkan oleh pemerintah pengelolaannya harus berjalan baik agar penerimaan dan pengeluarannya mampu memenuhi kebutuhan operasional sekolah selama satu periode. Manajemen keuangan yang efektif memungkinkan sekolah untuk merencanakan, mencapai, dan mencatat secara publik tuntutan operasional mereka untuk memfasilitasi pelaksanaan inisiatif pendidikan yang sukses dan efisien (Pamungkas, 2021).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan nonpegawai selama satu tahun termasuk dalam belanja operasional nonpegawai biasa yang merupakan bagian dari keseluruhan anggaran pendidikan. Tujuannya adalah agar satuan pendidikan mampu melaksanakan praktik pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan dan konsisten. Meskipun demikian, sejumlah jenis investasi dan biaya penggajian diperbolehkan untuk ditanggung oleh dana BOS (Yusra et al., 2021).

Di era globalisasi, pendidikan seringkali menghabiskan banyak uang bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Di Indonesia sendiri, persoalan mengenai biaya pendidikan sangat disayangkan terus menerus muncul seolah menjadi topik pembicaraan setiap tahun disandingkan yang dengan tingkat

kemiskinan. Meskipun angka kemiskinan Indonesia telah mengalami penurunan, namun masih berada pada posisi rendah yakni sebesar 9,66% atau sekitar 25,67 juta jiwa (Hidayatulloh, 2019). Menurut International Institute for Management Development (IMD), hal ini tentu masih belum cukup untuk meningkatkan standar pendidikan Indonesia. Hal ini tercatat dalam penelitian mereka pada tahun 2011, yang selanjutnya dikuatkan oleh survei PISA (Program for International Student Assessment) tahun 2011. Tahun 2019 menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia pada tahun 2018 memiliki kualitas yang rendah dan menempati peringkat ke-74 dari 79 negara lainnya.

Saptono (2017) menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Namun, pendidikan berkualitas tinggi selalu memerlukan biaya finansial, sehingga biaya pendidikan merupakan komponen penting dalam mempertahankan standar pengajaran yang tinggi (Nur Lailatus Subha, 2017). Mengingat pentingnya pendidikan serta peran pembiayaan dan keuangan untuk mendukung pendidikan itu sendiri, maka ini menjadi tugas bagi pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia salah satunya dengan memberikan pendanaan atau anggaran khusus untuk pendidikan yang dapat disebut sebagai biaya pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan keuangan yang besar dari pemerintah untuk pembiayaan pendidikan, hal ini sejalan dengan pengendalian keuangan yang baik dalam penerapan pendidikan melalui standar pendidikan, yang berdampak pada sekolah dan masyarakat. Karena keterbatasan anggaran, banyak sekolah yang tidak mampu menyediakan prasarana dan fasilitas pembelajaran sebaik mungkin, atau membayar instruktur serta melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Salah satu unsur kriteria Pendidikan Nasional yang mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan suatu negara adalah kriteria pembiayaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (PP RI SNP) memuat informasi tentang Standar Pembiayaan Pendidikan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sama-sama mempunyai tanggung jawab dalam bidang pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Bab IX, Pasal 62 PP tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Ada kekhawatiran pembelajaran berbasis sekolah akan menghambat proses pendidikan. Oleh karena itu, agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembiayaan pendidikan. Standar ini menjadi panduan bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program pendidikan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu gagasan pemerintah untuk memberikan subsidi pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Non Personil menyatakan bahwa tujuan BOS adalah memberikan dukungan finansial kepada satuan pendidikan dasar untuk melaksanakan program wajib belajar. Tujuan utama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Teknik BOS adalah untuk membantu biaya operasional sekolah, mengurangi beban keuangan siswa, dan meningkatkan kualitas proses pendidikan. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan kurikulum Pendidikan Menengah Umum (PMU), yaitu kurikulum wajib belajar 12 tahun yang diperkenalkan pada tahun 2013.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus menjadi landasan penerapan dana BOS (Yanti, 2021). Tim pengelola BOS sekolah menentukan pilihan, dan RKAS disusun berdasarkan pertemuan atau kesepakatan kerja sama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Agar pengelolaan keuangan BOS dapat mendukung tercapainya kinerja sekolah yang efektif dan efisien sesuai

dengan visi dan tujuan sekolah, maka pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab harus diwujudkan.

Meskipun pengelolaan BOS meliputi perencanaan, penggunaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang kurang memahaminya. Standar akuntansi keuangan harus dijadikan klasifikasi dan pedoman dalam penyusunan laporan yang diberikan kepada pemangku kepentingan agar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pelaporan penerimaan dan pengeluaran uang oleh sekolah sangatlah penting. Namun, sayangnya hingga kini masih banyak ditemukan penyalahgunaan dan penyelewengan dana BOS yang seharusnya digunakan sesuai fungsinya.

Mujiono (2017) menemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini termasuk tidak mengikuti petunjuk teknis (Juknis), meminta Kepala Sekolah dan Bendahara menangani seluruh pengelolaan, dan memasang papan informasi tentang dana BOS yang hanya dapat dilihat oleh Kepala Sekolah, yang merupakan satu-satunya pihak yang mengetahui secara spesifik. Hal ini membuka kemungkinan penggunaan dana BOS untuk keperluan lain. Selain itu, sekolah sering kali membubarkan Komite Sekolah untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan BOS yang mandiri.

Kasus penggelapan dana BOS oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Ternate, ini sangat disayangkan oleh LSM Mitra Maluku Utara dimana mereka mengkritik keras akan tindakan penggelapan dana BOS tersebut sebesar 800 juta pada triwulan II 2007 (Gregorius Jeandry, 2018). Selain itu, telah terjadi penyimpangan dana BOS dengan melakukan pengutan liar, suap dan tidak patuh kepada juknis yang ada. Sebagai contoh, Kepala Dinas Pendidikan Langkat dan 10 orang lainnya yang ditangkap karena

mengadakan pungutan liar serta pemotongan dana BOS untuk peserta didik. Mereka di tangkap basah oleh Polisi Daerah Sumatera Utara (L. Ramadhani & Suparno, 2020).

Tujuan dana BOS sendiri adalah untuk menjamin bahwa masyarakat mendapatkan pendidikan dengan baik. Namun, sering terjadi ketidaksesuaian dalam pemberian dana BOS. Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain keterlambatan surat pemberitahuan pembayaran dana di masing-masing daerah oleh Tim Pengelola BOS dan pendistribusian dana BOS yang sebenarnya. Misalnya saja, kepala sekolah SMK Negeri 53 Jakarta yang dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena melakukan korupsi terkait penanganan dana BOS. (Sifa Utairah, 2023).

Tindak pidana korupsi dana BOS juga terjadi di SMK Kerabat Kita Bumiayu dimana ditemukan penyalahgunaan dana sebesar Rp. 4.963.680.000. Kepala Sekolah dan Wakilnya bertanggung jawab atas penganiayaan ini. Selain itu, dilaporkan adanya kasus korupsi dana BOS tahun anggaran 2018 di SD Negeri Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang melibatkan Kejaksaan Agung yang bersangkutan. Selain itu, melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Polres Pekanbaru telah meminta keterangan kepada Bendahara BOS dan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Pekanbaru sebelumnya (Agustiawan et al., 2022).

Dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS maka semua pihak dapat berkerja sama dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, akuntabilitas dan keterbukaan berdampak positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS (Ufairah & Murtanto, 2023). Menurut penelitian Yusra dkk. (2021), akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan dana BOS di SD Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Wele & Mildawati (2022) yang menunjukkan bahwa meskipun keterbukaan tidak berdampak pada pengelolaan keuangan BOS,

akuntabilitas berdampak pada pengelolaan keuangan BOS. Di sisi lain, Fauzan (2014) menemukan bahwa akuntabilitas mempunyai dampak negatif dan dapat diabaikan terhadap pengelolaan keuangan BOS, namun transparansi mempunyai pengaruh yang baik dan besar.

Cara yang efisien untuk mengelola keuangan BOS adalah melalui partisipasi aktif para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, guru, orang tua, dan pegawai sekolah. Keputusan mengenai keuangan BOS bisa bersifat inklusif, fleksibel, dan sejalan dengan tujuan pembelajaran jika ada keterlibatan yang baik. Keterlibatan pemangku kepentingan dapat mempengaruhi efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan uang BOS di SD Negeri Tanah Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara, klaim Yusra dkk. (2021). Menurut Thanwain, penelitian Ahmad Jumarding pada tahun 2023, keterlibatan pemangku kepentingan berdampak signifikan dan menguntungkan terhadap seberapa baik pengelolaan dana BOS beroperasi.

Hal ini berbeda dengan temuan Rakhmawati (2018) yang menunjukkan bahwa keterlibatan mengubah hubungan antara akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana BOS secara negatif dan substansial. Namun, Pamungkas (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan, khususnya orang tua, hanya berdampak kecil terhadap seberapa baik dana BOS dikelola. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi penanganan dana BOS tidak bergantung pada tingkat keterlibatan orang tua.

Untuk memperkuat temuan penelitian tersebut di atas, maka peneliti memilih judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderating” mengingat adanya kesenjangan pada beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. “

1.2. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini akan membahas masalah yang berorientasi pada:

1. Hubungan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS.
2. Hubungan efektivitas dan keterbukaan pengelolaan dana BOS.
3. Hubungan efisiensi pengelolaan dana BOS dengan partisipasi pemangku kepentingan.
4. Asosiasi variabel moderasi, yaitu memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan efektivitas penanganan keuangan BOS.
5. Variabel moderasi memoderasi hubungan antara transparansi dan efisiensi pengelolaan dana BOS.

1.2.2. Batasan Masalah

Permasalahan penelitian di SMK Negeri Setiabudi dibatasi pada investigasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan uang BOS, dengan keterlibatan pemangku kepentingan sebagai variabel moderasi, agar penelitian ini tidak terlalu luas.

1.2.3. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan identifikasi masalah, kendala, dan konteks sejarah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas berdampak pada efektivitas pengelolaan dana BOS?
2. Apakah keterbukaan berdampak pada efektivitas pengelolaan dana BOS?
3. Apakah keterlibatan pemangku kepentingan mempengaruhi pengelolaan dana BOS?
4. Ketika kriteria tertentu dipertimbangkan, bagaimana akuntabilitas berdampak pada efisiensi pengelolaan dana BOS?
5. Jika dipengaruhi oleh beberapa faktor, bagaimana

keterbukaan dapat mempengaruhi efisiensi pengelolaan dana BOS?

1.3. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah dibahas menyebabkan pembagian tujuan penelitian menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
 - a) Cari tahu apakah akuntabilitas berdampak pada seberapa baik dana BOS dikelola.
 - b) Memastikan apakah efektivitas pengelolaan dana BOS dipengaruhi oleh transparansi.
 - c) Memastikan apakah keterlibatan pemangku kepentingan mempengaruhi seberapa baik dana BOS dikelola.
 - d) Mengkaji hubungan antara akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana BOS secara moderat.
 - e) Mengkaji hubungan antara transparansi dan moderasi dalam pengelolaan keuangan BOS.
2. Tujuan Khusus
 - a) Mengembangkan penelitian terkait akuntansi di Universitas peneliti.
 - b) Mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja.
 - c) Menyediakan peluang bagi mahasiswa untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan dalam ilmu ekonomi.
 - d) Meningkatkan kompetensi mahasiswa fakultas ekonomi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menawarkan keunggulan yang dibagi menjadi dua kategori, antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
 - a. Membuat penelitian ilmiah atau kontribusi ide di masa depan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama.
2. Aspek Praktis
 - a) Untuk membantu mahasiswa menyelesaikan tugas akhir skripsinya di Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada, Jurusan Akuntansi, serta menambah wawasan dan wawasannya.
 - b) Guru dapat mempelajari bagaimana keterbukaan dan akuntabilitas mempengaruhi seberapa baik dana BOS dikelola, dan keterlibatan pemangku kepentingan berperan sebagai faktor moderating.
 - c) Bagi Fakultas atau Universitas dapat menjadi kontribusi untuk mengevaluasi atas cakupan ilmu yang diperoleh mahasiswa akuntansi.